

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Aditjondro, George Junus. Korupsi Kepresidenan, Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anthony Aust. Handbook of International Law, Inggris: Cambridge University Press, 2005.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum, Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Chazawi, Adami. Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Moleong, Lexy. J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum – Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Parthiana, I Wayan. Hukum Perjanjian Internasional, Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- _____. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Bandung: Yrama Widya, 2003.

- _____. Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Robert Cryer, *et.al.*, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suradika, Agus. Teknik Analisis Data, Bagian ke-8, Jakarta: UMJ Press, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Waluyo, Bambang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yanuar, Purwaning M. Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Yunus, Muhammad. Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2013.

B. Jurnal:

- Achmad, Aang. *Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat*, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3 (2011).
- Alessandro De Chiara dan Ester Manna, *Corruption, Regulation, and Investment Incentives*, *European Economic Review*, (2022).
- Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia. *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 (2017).
- Amanda Luthfia Romadhani dan Hartiwiningsih. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, *Recidive*, Vol. 10 No. 1 (2021).
- Andries, Tamar T. K., *et.al.*, *Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Mutual Legal Assistance RI-Konfederasi Swiss dalam Pemberantasan Korupsi Ditinjau*

dari UU No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Lex Crimen, Vol. 10 No. 6 (2021).

Arifin, Ridwan, et.al., *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 1, No.1 (2016).

Aryono. *Asset Recovery yang Dilakukan oleh Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 1 (2018).

Budi, Ahmad Fahd. *Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyupai dan Gratifikasi di Indonesia*, Dharmasiswa, Vol. 1 No. 20 (2021).

Deddy Candra dan Arfin. *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal BPPK, Vol. 11 No. 1 (2018).

Eleanora, Fransiska Novita. *White Collar Crime, Hukum, dan Masyarakat*, Forum Ilmiah, Vol. 10 No. 2 (2013).

Fikry Latuaku dan Widati Wulandari. *Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Dibawa atau Disimpan ke Luar Negeri dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Jurnal Belo, Vol. 5 No. 1 (2019).

Garnasih, Yenti. *Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2 No. 3 (2009).

Hafid, Irwan. *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law*, Lex Renaissance, Vol. 6 No. 1 (2021).

Hanafi. *Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime*, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 1 (1994).

Hartono, Made Sugi. *Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2 No. 2 (2016).

Hasan, M. Irfansyah. *Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*, Lex Crimen Vol. VII No. 7 (2018).

Hashry Arum M. P. S. dan Heru Suyanto. *Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap di Indonesia*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 2 (2021).

- Hiariej, Eddy O. S. *Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 4 (2020).
- _____. *Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 4 (2020).
- _____. *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 1 (2019).
- Imbar, Maggie Regina. *Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lex Crimen, Vol. 4 No. 1 (2015).
- Indriati, Noer. *Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2 (2009).
- Kaligis, Indah Febriani. *Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lex Crimen, Vol 7 No. 1 (2018).
- Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri. *Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 (2020).
- Kurniawan, Indra. *Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Jurnal Buletin Konstitusi, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Laoh, Clinton Trivo. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime*, Lex Crimen, Vol. 8 No. 12 (2019).
- Mahmud, Ade. et.al., *Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021).
- Mahmud, Ade. *Problematisasi Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR*, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 3 (2018).
- Maria Efita Ayu dan Sherly Ayuna Putri, *Perdagangan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.3 No. 1 (2018).
- Miftakhuddin, *Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Jurnal Rihlah, Vol. 7 No. 2 (2019).

- Mitchell, James N. *Transnational Organised Crime In Indonesia - The Need For International Cooperation*, Brawijaya Law Journal, Vol. 3 No. 2.
- Muchtar, Henni. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan*, Demokrasi, Vol. IX No. 1 (2010).
- Muhammad, Rusli. *Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 (1994).
- Permana, Aramdhan Kodrat. *Wacana Anti Korupsi dalam Perspektif Islam Anti-Corruption Discourse in Islamic Perspective*, At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, Vol. 04 No. 01 (2019).
- Petter Gottschalk dan Christy Smith, *Detection of White Collar Corruption in Public Procurement in Norway: The Role of Whistleblowers*, International Journal of Procurement Management, Vol. 9 No.4 (2016).
- Purwandoko, Prasetyo Hadi. *Prospek Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Harapan Baru, Kelemahan, dan Solusi*, Yustisia, Vol. 1 No. 2 (2012).
- Purwanto, Harry. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 (2009).
- Raharjo, Agus. *Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 (2008).
- Rahayuningsih, Toetik. *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*, Yuridika, Vol. 28 No. 3 (2013).
- Ricardos Santos dan Hery Firmansyah. *Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Ridwan. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60 Th. XV, (2013).
- Sari, Indah. *Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 1 (2015).
- Simanjuntak, Efendi Lod. *Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang di ASEAN Melalui Mutual Legal Assistance*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8 No. 1 (2020).

- Simanjuntak, Marcella E. *Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi*, MMH, Jilid 42 No. 1 (2013).
- Siswanto, Dadang. *Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*, MMH, Jilid. 42 No. 1 (2013).
- Sosiawan, Ulang Mangun. *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No.4 (2020).
- Suraji, *Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 12 No. 2 (2008).
- Suraputra, D. Sidik. *Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan (1990).
- Suryono, Ahmad. *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif Sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi*, Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi (2017).
- Susilawati, Ika Yuliana. *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)*, Jurnal IUS, Vol. 4 No. 2 (2016).
- Syaifulloh, Abvianto. *Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 1 No. 1 (2019).
- Syamsudin, Muhammad. *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*, UNISIA, Vol. XXX No. 64 (2007).
- Usma, Marni. *Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi ke Indonesia*, Lex Crimen Vol. 8 No. 10 (2019).
- Vettori, Barbara. *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in The EU*, Springer, Berlin (2006).
- Virginia M. Kendall dan T. Markus Funk, *The Role of Mutual Legal Assistance Treaties in Obtaining Foreign Evidence*, American Bar Association, Vol. 40 No. 2 (2014).
- Wagley, John R. *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*”, *Congressional Research Service*, The Library of Congress, (2006).

Widayati, Lidya Suryani. *Kedaluwarsa dan Grasi Sebagai Dasar Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana, Perlukah Diatur Kembali dalam RUU KUHP*, Negara Hukum, Vol. 12 No. 1 (2021).

Wuisang, Ari. *Kewenangan DPR dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018*, Pakuan Law Review, Vol. 5 No. 2 (2019).

Wullur, Rodrigo. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional*, Lex Administratum, Vol. 9 No. 1 (2018).

Zuber, Ahmad. *Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Journal of Development and Social Change, Vol. 1 No. 2 (2018).

C. Internet:

Aji, M Rosseno. “Kasus BLBI, Kwik Kian Gie: Keputusan Megawati Berakibat Fatal”, <https://nasional.tempo.co/read/1103925/kasus-blbi-kwik-kian-gie-keputusan-megawati-berakibat-fatal/full&view=ok>, diakses pada tanggal 3 Mei 2022.

ASEAN-PAC, “Background”, https://www.asean-pac.org/?page_id=4223, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

ASEAN-PAC, “Background”, https://www.asean-pac.org/?page_id=4223, diakses pada tanggal 20 April 2022.

ASEAN, “Overview ASEAN Political Security Community”, <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

ASEANAPOL, “Chronology”, <http://www.aseanapol.org/about-aseanapol/chronology>, diakses pada tanggal 22 April 2022.

ASEANAPOL, “Functions”, <http://www.aseanapol.org/about-aseanapol/objectives-and-functions>, diakses pada tanggal 22 April 2022.

Cambridge Dictionary, “Asset”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/asset>, diakses pada tanggal 22 April 2022.

- Cambridge Dictionary, “Corruption”,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption>, 2022,
 diakses pada tanggal 30 Maret 2022.
- Cambridge Dictionary, “Recovery”,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recovery>, diakses pada
 tanggal 22 April 2022.
- CNN Indonesia, “Kasus BLBI Sjamsul Nursalim, dari Buron Hingga Disetop
 KPK”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210401192707-12-625134/kasus-blbi-sjamsul-nursalim-dari-buron-hingga-disetop-kpk>,
 diakses pada tanggal 9 Mei 2022.
- Debora, Yantina. “Di Luar Paradise Papers, Berapa Banyak Harta Keluarga
 Soeharto?”, <https://tirto.id/di-luar-paradise-papers-berapa-banyak-harta-keluarga-soeharto-czM6> diakses pada tanggal 2 Mei 2022.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, “Hasil Pemantauan Tren
 Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”,
<https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>, diakses pada 25 April 2022.
- Dianti, Flora, “Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021.
- Forbes, “The World's All-Time Most Corrupt Leaders”,
https://www.forbes.com/2004/03/25/cx_vc_corruptslide.html?sh=3deda5fc4f07, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
- Guritno, Tatang. “Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari
 Hukuman Mati”,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/07475821/heru-hidayat-koruptor-asabri-rp-227-triliun-yang-lolos-dari-hukuman-mati?page=all>,
 diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
- Idris, Muhammad. “Perjalanan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Rugikan
 Negara Rp 4,5 Triliun”,
<https://money.kompas.com/read/2021/04/09/071630926/perjalanan-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-yang-rugikan-negara-rp-45-triliun?page=all>, diakses
 pada tanggal 3 Mei 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Korupsi”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, 2016, diakses pada tanggal 18
 Maret 2022.

Kejaksaan Republik Indonesia, “*Capaian Kinerja: Selamatkan Uang Negara Puluhan Triliun Hingga Sukses Gelar PPPJ Secara Virtual*”, <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1254>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “*Peran Penting MLA dalam Penegakan Hukum Internasional*”, <https://kemenkumham.go.id/berita/peran-penting-mla-dalam-penegakan-hukum-internasional>, diakses pada tanggal 21 April 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12980/Zona-Integritas-menusu-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html>, diakses pada tanggal 23 April 2022.

Media Indonesia, “*Sjamsul Nursalim Bebas, Mahfud: Negara tetap Buru Aset BLBI*”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/396681/sjamsul-nursalim-bebas-mahfud-negara-tetap-buru-aset-blbi>, diakses pada tanggal 3 Mei 2022.

Merriam-Webster Dictionary, “*Corruption*”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruption> diakses pada tanggal 14 April 2022.

Narasi TV, “*Eddy Tansil Ada di China, Hartanya Makin Berlipat Ganda*”, <https://narasi.tv/buka-mata/eddy-tansil-ada-di-china-hartanya-makin-berlipat-ganda>, diakses pada tanggal 3 Mei 2022.

Nasional Kontan, “*Negara-Negara Ini Telah Menjalin Perjanjian MLA dengan Indonesia*”, <https://nasional.kontan.co.id/news/negara-negara-ini-telah-menjalin-perjanjian-mla-dengan-indonesia> diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

Nasional Tempo, “*23 Tahun Reformasi: Jalan Panjang Menuntaskan Kasus Korupsi Era Soeharto*”, https://nasional.tempo.co/read/1464642/23-tahun-reformasi-jalan-panjang-menuntaskan-kasus-korupsi-era-soeharto?page_num=2, diakses pada tanggal 2 Mei 2022.

Prabowo, Dani. “*Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan*”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/05430011/ini-kasus-kasus-korupsi-yang-terjadi-setelah-kemerdekaan-?page=all>, diakses pada tanggal 2 Mei 2022.

Rahma, Andita. “Kasus Asabri, Kejaksaan Agung Temukan Ada Aset Heru Hidayat di Singapura”, <https://nasional.tempo.co/read/1446071/kasus-asabri-kejaksaan-agung-temukan-ada-aset-heru-hidayat-di-singapura/full&view=ok>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Sekretariat Humas Deputy Bidang Investigasi, “Oleh-Oleh Dari Konferensi UNCAC Ke-2 di Bali”, <https://www.bpkp.go.id/investigasi/berita/read/5963/0/Oleh-oleh-dari-Konferensi-UNCAC-ke-2-di-Bali.bpkp>, diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

Tempo, “Perhiasan Imelda Marcos yang Disita Filipina Bakal Dijual”, <https://dunia.tempo.co/read/1211069/perhiasan-imelda-marcos-yang-disita-filipina-bakal-dijual/full&view=ok> diakses pada tanggal 16 Januari 2022.

Transparency, “First Global Convention Against Corruption To Come Into Force”, <https://www.transparency.org/en/news/first-global-convention-against-corruption-to-come-into-force>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

D. Skripsi dan Tesis:

Amalia, Rizki. 2013. “Studi Analisis Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Solo.

Erawati, Resty. 2009. “STAR Initiative Sebagai Action Plan Bagi Pemerintah dalam Mengembangkan Aset-Aset Hendra Rahardja di Hongkong dan Australia”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Fajar, Deo Putra. 2020. “Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Pengembalian Aset Kasus Korupsi”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Kulsum, Umami. 2008. “Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember.

Kurniawan, Indra. 2021. “Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

- Mahadika, Pradipta. 2018. “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Dikaitkan dengan Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003 oleh Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Pakpahan, Jon Hadi. 2017. “Upaya Pemberantasan Korupsi Pada Masa Orde Baru (1967-1983)”, Skripsi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ponglapik, Gregorius Alisander. 2021. “Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia Ditinjau dari Pengaturan Subsidi dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rosaningrum, Vika. 2010. “Implementasi Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Among ASEAN Member Countries (MLAT) dalam Penanganan Kejahatan Korupsi di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Sukardi, Irma. 2012. “Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana”, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

E. Laporan Penelitian:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Laporan Akhir Naskah Akademik (Jakarta, 2012).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Central Authority dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Laporan Penelitian (Jakarta, 2012).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Laporan Naskah Akademik (Jakarta, 2015)

F. Peraturan Perundang-Undangan:

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir 2002.

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

G. Wawancara:

Laksmiana, Banu Wawancara, Jaksa bidang Transnasional Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta: 31 Mei 2022).

Pardede, Sonora, Wawancara, Jaksa Fungsional Bidang Transnasional Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta: 31 Mei 2022).